



**KRITERIA PENENTUAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS
TINDAK PIDANA KORPORASI**

TESIS

PUTRI TRIE LESTARI

2110622059

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

2023



**KRITERIA PENENTUAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS
TINDAK PIDANA KORPORASI**

TESIS

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

PUTRI TRIE LESTARI

2110622059

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Putri Trie Lestari

NRP : 2110622059

Tanggal : 24 Juli 2023

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan.

Jakarta, Juli 2023

Yang Menyatakan,



(Putri Trie Lestari)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Trie Lestari

NRP : 2110622059

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “KRITERIA PENENTUAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA KORPORASI”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Juli 2023

Yang menyatakan,



(Putri Trie Lestari)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: upnvj@upnvj.ac.id

TESIS

**KRITERIA PENENTUAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS
TINDAK PIDANA KORPORASI**

PUTRI TRIE LESTARI

2110622059

Telah disetujui untuk Ujian Tesis

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN 0019126303

Jakarta, 13 Maret 2023

Mengesahkan,

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes
NIP. 199304282022031009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: upnvj@upnvj.ac.id

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :
Nama : Putri Trie Lestari
NRP : 2110622059
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Kriteria Penentuan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Oleh Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Korporasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji

Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LLM.

NIDN : 0022098702

Penguji I

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

NIDN : 0027018603

Penguji II

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN : 0019126303

Dekan



Dr. Supriyanto, S.H., LLM.

NIDN : 0302067004

Kaprodi

Dr. Handar S. B., S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.

NIDN : 0028049301

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 15 Juli 2023

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang kriteria penentuan teori pertanggungjawaban pidana korporasi oleh Hakim dalam memutus Tindak Pidana Korporasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia yang baru disahkan di Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) produk Indonesia dengan mengkaitkan 3 (tiga) putusan pidana korporasi menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah diatur dimasing-masing Undang-Undang tindak pidana khusus di luar KUHP. Namun, sejak lahirnya KUHP baru produk Indonesia membuat pertanggungjawaban pidana korporasi mulai diatur secara rinci walaupun masih berlaku 3 (tiga) tahun setelah disahkan. Diatur di masing-masing Undang-Undang yang berbeda membuat pertanggungjawaban pidananya menjadi berbeda. Hal ini membuat tidak adanya satu kesatuan peraturan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. 3 (tiga) putusan pidana korporasi Terdakwa adalah korporasi atau orang pribadi yang menduduki jabatan dalam korporasi dan bertanggung jawab kepada korporasi dengan menggunakan 3 (tiga) teori yang berbeda. Hakim yang mengadili perkara pidana korporasi selalu berpendapat bahwa peran direktur sangat vital dalam jalannya perusahaan, selama ia bukan direktur atau utusan atau perintah dari direktur, maka pertanggungjawaban pidana perseroan akan dijatuhkan sendiri-sendiri, tetapi selama campur tangan direktur terlibat dan itu untuk kepentingan perusahaan, perusahaan juga akan tunduk pada hukum dengan ketentuan hukuman diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Teori Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Putusan Hakim

ABSTRACT

This research was conducted to examine the criteria for determining the theory of corporate criminal responsibility by judges in deciding corporate crimes. The background of this research is the regulation on corporate criminal liability in Indonesia which has just been ratified in Law no. 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP) by linking 3 (three) corporate criminal decisions using the theory of corporate criminal responsibility. This study uses a normative juridical approach. The results of the study show that corporate criminal responsibility in Indonesia has been regulated in each special criminal act law outside the Criminal Code. However, since the birth of the new Indonesian product Criminal Code, corporate criminal liability has begun to be regulated in detail, although it is still valid 3 (three) years after it was ratified. Regulated in each of the different laws makes the criminal responsibility different. This results in the absence of a unified regulation regarding corporate criminal liability. 3 (three) corporate criminal decisions The defendant is a corporation or individual who holds a position in a corporation and is responsible to the corporation using 3 (three) different theories. Judges who try corporate criminal cases are always of the opinion that the director's role is very vital in the running of the company, as long as he is not a director or a representative or an order from the director, then the company's criminal liability will be imposed individually, but as long as the director's intervention is involved and it is for the benefit of the company, the company will also be subject to the law with provisions for penalties regulated in the applicable laws and regulations.

Keyword : Theories of Criminal Liability, Corporations, Judge's Decisions

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Kriteria Penentuan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Oleh Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Korporasi”. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Dr. Anter Venus, MA, Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M., selaku Ketua Penguji yang memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini
5. Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan dalam penyusunan tesis ini
6. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini
7. Orangtua Penulis, Bapak L. L. Tobing, Kakak Penulis, Anna Lilian dan Maria Naomi Dhevega, Calon Mama Mertua Penulis Agnes Welan serta Calon Suami Penulis Vernell Kelvin Lekatompessy, yang selalu memberikan dukungan moral, doa, dan kasih sayang kepada Penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan Penulis kelas Pidana angkatan 2021 serta semua pihak tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam tesis ini, oleh karena itu, kritik dan saran sangat dibutuhkan demi perbaikan kedepan. Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya.

Jakarta, Juli

2023

Putri Trie Lestari

DAFTAR ISI

JUDUL PROPOSAL	I
PERNYATAAN ORISINALITAS	II
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	III
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	IV
PENGESAHAN	V
ABSTRAK	VI
<i>ABSTRACT</i>	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
BAB I	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI	18
B. TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI 23	
BAB III	
A. JENIS PENELITIAN	37
B. PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM	37
C. SUMBER DATA PENELITIAN	37
BAB IV	
A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA ...	39

B. FORMULASI TERBAIK KRITERIA PENENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA KORPORASI.....	44
BAB V	
A. KESIMPULAN	66
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	
A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	69
B. BUKU	69
C. JURNAL	71
D. INTERNET (WEBSITE)	72
RIWAYAT HIDUP	721

DAFTAR TABEL

TABEL 1 KRITERIA PENENTUAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA KORPORASI	49
---	----